

DLHK DIY LAKUKAN EVALUASI SECARA RUTIN

Sleman Ajukan Tambahan Kuota Pembuangan Sampah

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan sampah dengan mengajukan penambahan kuota pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan. Untuk permintaan secara informal, Pemkab Sleman minta kuota 500 ton sampai 1.000 ton sampah.

“Pengajuan penambahan kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Piyungan secara informal sudah diajukan. Dulu sudah pernah bersurat, tapi setelah itu pernah ada evaluasi. Selain Sleman, kami juga mempertimbangkan Kota Yogyakarta dan Bantul. Mengingat tidak bisa semua permintaannya dikabulkan, tapi mempertimbangkan kondisi di lapangan,” kata Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo di Sleman, Senin (5/8). Menurutnya, DLHK DIY secara rutin melakukan evaluasi terhadap kondisi TPA Regional Piyungan dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Untuk Kota Yogya dan Bantul pada Selasa (6/8) rencananya dilakukan pengangkutan sampah ke TPA Piyungan masing-masing sebanyak 200 ton. Selain penambahan kuota,

DLHK DIY juga memantau perkembangan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran yang diinisiasi oleh BUMD Bantul. “Apabila kondisi memungkinkan dan TPA Piyungan ada *space* akan kami geser sampah dari Sleman. Tentunya sampah yang digeser tidak semua tapi sesuai dengan kemampuan kami di lapangan,” ungkapnya. Kusno menambahkan,

Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk membantu percepatan persoalan sampah di wilayahnya. Bantuan yang diberikan bisa berupa pendanaan maupun manajemen program. “Kalau soal PII kan ada pendampingan, menghantarkan sampai ke desentralisasi. Ini masih ada waktu kajian di Kabupaten Sleman, Kota Yogya dan Bantul. Begitu pula dengan Kulonprogo dan Gunungkidul. Jadi semacam kajian untuk mengoptimalkan desentralisasi,” terangnya. **(Ria)-d**

FATHUL WAHID KEMBALI PIMPIN APTISI V

Pemerintah Perlu Fokuskan PTN Masuk WCU

SLEMAN (KR) - Pemerintah mendatang perlu mengalokasikan dana besar ke perguruan tinggi negeri (PTN) agar mereka fokus sebagai pusat ilmu serta masuk dalam World Class University (WCU). Misal UGM pusat nuklir, ITB pusat mesin dan yang lainnya apa, sesuai keunggulannya. Dengan demikian dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB), PTN tidak menjadi pukat harimau yang mengambil apa saja.

Ketua Aptisi Pusat Dr HM Budi Djatmiko mengemukakan hal tersebut dalam pelantikan Aptisi Wilayah V di Ruang Cinema Universitas Amikom Ringroad Utara Condongcatur, Senin (5/8). Pengurus periode 2023 - 2027 yang baru dilantik dan diambil sumpahnya setelah pemilihan setela-



KR-Fadmi Susiwi

Pengurus Aptisi Wilayah V dilantik Ketua Aptisi Pusat.

ngah tahun silam adalah Ketua Fathul Wahid PhD dan Sekretaris Dr Wegig Pratama.

“Ini perlu dipikirkan. Kualitas PTN kita masih belum ada yang WCU 10 besar atau 50 besar bahkan 100 besar,” tandas Budi Djatmiko. Padahal, lanjutnya pemerintah kurciran dana ratusan miliar bahkan triliun. Sehingga seyonyalah Rektor PTN

harus berpikir membawa lembaganya menuju WCU. Bukan hanya menjadi jago kandang dan hanya bersaing dengan PTS.

Dikatakan, kacaubalaunya negeri ini karena mengabaikan pendidikan akhlak. Kian memprihatinkan dan menjadi semakin berjodoh ketika pendidikannya tidak mencirikan akhlak mulia, pemimpinnya tidak uswah. “Kare-

nanya Aptisi mengusulkan agar ujian-ujian untuk anak-anak di tingkat PAUD, TK dan SD yang tidak terlalu diperlukan, dihapus. Sebagai ganti diusulkan ajaran-ajaran mulia seperti menghormati orang lain, disiplin, sabar, etika bicara dengan orang tua, budaya antrin dan lainnya,” tambah Budi.

Sementara Ketua Aptisi Wilayah V Fathul Wahid menyebut tantangan PTS di Indonesia salah satunya terkait PMB. Di antara itu yang menjadi rahasia publik adalah PTN yang menerima mahasiswa ‘kurang sopan’ dalam bahasa halusnnya. Namun juga ada isu lain seperti daya beli masyarakat yang menurun, prioritas program pendidikan bagi masayraka dan lainnya. **(Fsy)-d**

INDONESIA BUTUH HALUAN NEGARA

Pancasila Bukan Ideologi Impor



KR- Franz Boedisukarnanto

Drs HM Idham Samawi menyampikan paparannya dalam acara, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Di Kantor Percetakan KR Kalitirto, Berbah Sleman, Senin (5/8).

YOGYA (KR) - Kebanggaan terhadap NKRI dan Pancasila harus terus dipupuk. Pasalnya, Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan keragaman suku, budaya, agama di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis dan tidak terpecah belah.

Demikian dikatakan Anggota DPR RI (Fraksi PDI Perjuangan) Drs HM Idham Samawi di hadapan ratusan insan pers dan tokoh masyarakat dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Percetakan PT BP Kedaulatan Rakyat Jalan Solo, Kalitirto Berbah Sleman, Senin (5/8). Kegiatan bertema ‘Bersatu Padu dari Yogyakarta Ikut Membangun Karakter Bangsa’ diselenggarakan MPR RI berkolaborasi dengan Forum Kebangsaan dan Pendidikan Pancasila Yogyakarta. Narasumber lain Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Dr Octo Lampito dimoderatori Dr Ronny Sugiantoro (Wapemred KR).

Menurut Idham, bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki ideologi Pancasila yang bisa mempersatukan NKRI. Banyak bangsa di dunia ini yang hanya terdiri sedikit suku, namun terpecah belah dan bubar, sebut saja Uni Soviet dan Yugoslavia. “Pancasila dapat diterima oleh semua suku dan agama di Indonesia, karena Pancasila bukan ideologi impor, melainkan nilai-nilainya digali oleh Sukarno dan para pendiri bangsa dari bu-

mi Nusantara,” ujarnya.

Menurut Idham, begitu pentingnya Pancasila, maka di setiap dada para penyelenggara negara, Presiden, anggota dewan, kepala daerah, hingga lurah tersemat lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. “Ini bukan tanpa alasan, agar kebijakan-kebijakan para penyelenggara negara mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” katanya

Namun Idham Samawi menyayangkan hilangnya haluan negara Indonesia, padahal haluan itu sangat dibutuhkan sebagai panduan pembangunan agar terus sinergis meskipun berganti pemimpin/presiden. Tanpa haluan negara, konsolidasi bangsa tidak bisa terwujud. “Maka perlu adanya amandemen kelima terhadap UUD 1945 terutama pada batang tubuhnya untuk mengembalikan haluan negara tersebut, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan menjadi negara besar,” katanya.

Sementara Octo Lampito menjelaskan tentang bahaya berita bohong/hoaks yang bisa memecah belah bangsa, termasuk hoaks terhadap Pancasila. Menurutnya, berita hoaks masih akan terus bertebaran, terlebih jelang Pilkada 2024. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami beberapa hal untuk menangkal hoaks. Seperti perlu mencermati situs harus dari sumber terpercaya, atau mengonfirmasi kebenaran berita/foto lewat Google. **(Dev)-d**

IPM Sleman Deklarasi Bebas Miras



KR-Istimewa

Bupati Kustini bersama pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah Sleman.

SLEMAN (KR) - Puncak HUT ke-63 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sleman di Pendapa Kalurahan Condongcatur Depok Sleman, Sabtu (4/8) malam berlangsung meriah, mempertemukan lebih dari 200 pelajar dan mahasiswa dari seluruh DIY. Pada kesempatan itu diluncurkan tiga inisiatif inovatif yang bertujuan meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa Muhammadiyah. Malam puncak menjadi

ajang untuk menampilkan program-program baru dan potensi dampaknya terhadap perjalanan pendidikan pelajar Muhammadiyah. Bupati Sleman Kustini yang hadir pada malam itu menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar organisasi dapat terus sukses.

Sementara Ketua PD IPM Sleman Nail Anfasa Fadla memimpin deklarasi yang menandakan komitmen mahasiswa

Muhammadiyah Sleman untuk bebas alkohol. Deklarasi ini merupakan wujud simbolik dedikasi para santri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Muhammadiyah yang menganjurkan pola hidup sehat dan bertanggung jawab.

“Dengan secara terbuka menegaskan sikap terhadap konsumsi alkohol, para pelajar dan mahasiswa menunjukkan solidaritas mereka dalam mempromosikan budaya sejahtera dan sejahtera di kalangan warga Muhammadiyah. Deklarasi ini tidak hanya mencerminkan pilihan pribadi para santri, namun juga selaras dengan misi Muhammadiyah yang lebih luas, yaitu membina individu-individu yang memiliki perilaku beretika dan berbudi luhur,” ujar Nail Anfasa. **(Has)-d**



KR-Saifullah Nur Ichwan

Subanar Surya SLEMAN (KR) - Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati yang sudah mendapat SK Penetapan Tahap I dari DPP PKB H Sukanto SH mengklaim mendapat dukungan tertulis dari 17 Dewan Pengurus Anak Canang (DPAC) PKB Sleman. Hal itu sebagai bukti bahwa Sukanto mendapat dukungan dari arus bawah. “Benar kami sudah da-

pat dukungan surat tertulis dari 17 DPAC PKB. Dan bukti dukungan itu sudah kami pegang,” kata Tim Pemenangan H Sukanto SH, Subanar Surya, Senin (5/8).

Menurutnya, setelah mendapatkan SK Penetapan Tahap I, Sukanto langsung gerak untuk melakukan sosialisasi dan ko-

ordinasi dengan internal maupun eksternal. Bahkan sudah melakukan konsolidasi dengan DPC dan DPW. “Sosialisasi dan komunikasi sudah gencar dilakukan oleh Sukanto. Khususnya di internal PKB, mulai dari DPC sampai DPW sudah dilakukan,” ujarnya. Putri dari H Sukanto,

Rahayu Widi Nuryani SH MH menambahkan, Sukanto saat ini juga telah menjalin komunikasi dengan para tokoh lintas agama. Bahkan juga sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan para kiai. “Jadi kami tidak hanya melakukan komunikasi dengan internal PKB saja,” katanya. **(Sni)-d**

KUPAS MAKNA TARIAN KEPRAJURITAN KLASIK

Bedah Naskah Kuno ‘Serat Wedhataya’

SLEMAN (KR) - Sanggar Hadi Seminar Tempel bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sleman menggelar bedah ‘Serat Wedhataya’ di Omah Petroek Pakem Sleman, Senin (5/8). Acara diikuti dari DPAD DIY, Pemilik Naskah Kuno Wilayah Kabupaten Sleman, kalurahan penerima bantuan Pocadi (Pojok Baca Digital), guru Bahasa Jawa, kepala sekolah, TBM, pemerhati budaya Jawa, pecinta tari dan naskah kuno. Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan Pojok Baca Digital (Pocadi) untuk empat kalurahan yakni Sendangadi, Balecatrak, Sindumartani dan Condongcatur.

Ketua Panitia Kabad Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan Sleman



KR-Istimewa

Plt Kepala DPK Slemam Abu Bakar menyerahkan Pojok Baca Digital.

Ch Rini Puspitasari menyebut, bedah naskah kuno dimaksudkan alih bahasa dan aksara dan mengedukasi agar masyarakat mengetahui dan memahami naskah kuno yang terkan-

dung di dalamnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan (DPK) Sleman Abu Bakar mengatakan, ‘Serat Wedhataya’ merupakan naskah kuno yang berisi mengupas

makna tarian keprajuritan klasik yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Narasumber dalam bedah naskah kuno Drs Antonius Suparno Dipomengolo (pemilik ‘Serat Wedhataya’) yang merupakan warisan dari ayahnya yang mengulas tari keprajuritan. Hadir pula maestro Didik Nini Thowok yang bersedia membedah buku naskah kuno yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa dapat dengan mudah dipahami bagi generasi muda.

Buku ini ditulis oleh Penulis Pakempalan Yogyakarta Surakarta Hadiningrat setelah 56 hal 21 cmx16 cm. Berisi filosofi gerakan tari ada 11 jenis tarian. Dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari jenis-jenis tari. **(Has)-d**

DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Selalu Komitmen Memperjuangkan Kepentingan Perempuan

SLEMAN (KR) - Selama menjadi anggota DPRD Sleman periode 2019-2024, Sri Riyadiningsih SPd selalu komitmen memperjuangkan kepentingan perempuan. Tujuannya untuk mendorong para perempuan di Kabupaten Sleman lebih berdaya di bidangnya masing-masing.

“Memperjuangkan kepentingan perempuan itu sudah jadi cita-cita dan komitmen saya ketika ingin maju sebagai wakil rakyat. Dan itu sudah saya buktikan selama menjadi anggota DPRD Sleman sejak periode pertama 2015-2019 dan 2019-2024,” kata Sri Riyadiningsih, anggota Fraksi PDI Perjuangan Sleman ini, Senin (5/8).

Meskipun saat ini belum dapat melanjutkan duduk di parlemen, perempuan yang kerap disapa Dini tetap akan selalu mendampingi perempuan. Prinsipnya, dalam berjuang dan mengabdikan ke masyarakat tidak harus menjadi legislator. “Melakukan pendampingan ke masyarakat sudah menjadi bagian hidup sa-

Sri Riyadiningsih SPd Anggota DPRD Sleman



KR-Istimewa

Sri Riyadiningsih (tengah) bersama KWT dan penggerak PKK Mlati.

ya. Jadi saya tetap akan memperjuangkan kepentingan perempuan,” ujar warga Mlati ini.

Menurut Dini, pemerintah daerah saat ini sedang fokus di bidang pertanian, UMKM, ekonomi keluarga, koperasi dan pemberdayaan lainnya. Dirinya mendorong para perempuan dapat mengambil peran penting di bidang-bidang tersebut. “Sudah saatnya peran perempuan ditampilkan. Perempuan harus berani tampil di sektor pertanian, ekonomi keluarga, UMKM maupun pemberdayaan lain-

nya,” pinta anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman ini.

Namun untuk mendorong perempuan lebih berdaya, perlu ada keperpihakan anggaran bagi perempuan. Anggaran itu untuk memfasilitasi para perempuan dapat tampil seperti pelatihan, pendampingan dan lainnya. “Kami berharap, pengalangan anggaran bagi perempuan yang selama ini lakukan terus dilakukan oleh anggota DPRD selanjutnya. Supaya para perempuan di Sleman lebih berdaya,” harap Dini. **(Sni)-d**